

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 membuka peluang besar untuk mengurus rumah tangga sendiri dengan lebih leluasa dan lepas dari campur tangan pemerintahan pusat. Diharapkan dengan otonomi ini, seluruh provinsi dan kabupaten/kota mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan potensi daerahnya. Hal ini pada akhirnya akan mendorong keseimbangan pembangunan antara daerah dan pusat.

Saraswati (2018) berpendapat bahwa otonomi daerah akan memicu semangat daerah untuk mengelola wilayahnya dengan mandiri dan menjadi sumber pembangunan nasional. Otonomi ini menjadi pendorong bagi daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan potensi dan keunggulannya masing-masing, yang pada gilirannya akan menghasilkan percepatan ekonomi. Jelaslah bahwa otonomi daerah memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jangka panjang dalam output per kapita. Proses ini mencakup tiga aspek penting. Pertama, terjadi suatu proses yang dinamis dalam pertumbuhan ekonomi, di mana ekonomi terus berkembang dan berubah. Kedua, pertumbuhan ekonomi terkait dengan peningkatan output perkapita, melibatkan dua dimensi utama: total output dan populasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai fenomena jangka panjang, di mana ekonomi akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang lebih lama (Damara, 2021).

Gustiana (2014), dalam menentukan keberhasilan suatu daerah pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting yang perlu di hitung. Keberhasilan ini diukur dengan berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi

itu sendiri, perubahan struktural perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil peningkatan berbagai sektor perekonomian yang tidak langsung menunjukkan besarnya perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah diukur dari produksi barang dan jasa yang tercermin dalam PDB atau produk domestik bruto di wilayah tersebut.

Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah dipandu oleh tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka secara aktif menjalankan berbagai strategi menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen kuat ini didasarkan pada keyakinan yang kuat bahwa ekspansi ekonomi yang pesat akan mendorong perekonomian yang lebih tangguh, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan PDRB.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga

**Tabel 1. 1 Data Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Serta Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022.**

Tahun	Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	PDRB (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2018	163.996.189,04	5,14
2019	172.205.571,30	5,01
2020	169.426.614,10	-1,61
2021	175.000.501,95	3,29
2022	182.629.542,51	4,36

Sumber: Data diolah BPS Sumbar

Antara tahun 2018 dan 2022, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dan menurun, seperti yang ditunjukkan oleh data pada tabel 1.1 di atas. Penurunan PDRB atas harga konstan terjadi pada tahun 2020 sebesar 169.426.614,10 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar -1,61. Pada tahun 2018 menjadi pertumbuhan PDRB terbaik selama 5 tahun terakhir sebesar

163.996.189,04 dengan laju pertumbuhan 5,14. Pada tahun 2019 PDRB mengalami pertumbuhan yang baik sebesar 172.205.571,30 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01. Setelah menurun tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 175.000.501,95 dengan laju pertumbuhan 3,29. Kenaikan juga diikuti tahun 2022 sebesar 182.629.542,51 dengan laju pertumbuhan 4,36 (BPS Sumbar, 2022).

Tujuan PAD ialah supaya pemerintah daerah bisa membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi dari daerah sebagai bentuk desentralisasi (Montolalu, 2017). PAD yang meningkat diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah melakukan investasi belanja modal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Arini & Kusuma, 2019). Namun penilaian terhadap desentralisasi anggaran mempunyai dua bagian. Sedangkan, desentralisasi fiskal memberi kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Namun desentralisasi fiskal juga menimbulkan permasalahan baru akibat adanya perbedaan jumlah cadangan anggaran antar daerah. Permatasari & Mildawati (2016) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah (kabupaten, kota) setelah diterapkannya desentralisasi fiskal. Kesenjangan ini muncul karena keuntungan keuangan bawaan yang dinikmati oleh daerah tertentu, yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dan memacu pembangunan yang lebih pesat. Sebaliknya, daerah dengan sumber keuangan terbatas mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang lebih lambat (Santosa & Rofiq, 2013). Menyadari ketidakseimbangan ini, pemerintah pusat telah menerapkan mekanisme dukungan keuangan yang dikenal dengan pemerataan modal untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mendorong kemajuan daerah yang lebih adil.

Selanjutnya, Dana Perimbangan ialah anggaran dana dari pusat kepada daerah melalui APBN untuk membiayai kebutuhan daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan PP No.55/2005, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. DAU merupakan bentuk kompensasi dari pemerintah pusat dan penyalurannya didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan antar daerah, sejalan dengan pengelolaan urusan-urusan pemerintahan (Nurdiwaty dkk., 2017).

Untuk memastikan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sumber daya keuangan didistribusikan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus setiap daerah (Budianto & Alexander, 2017). Dalam pendapatan daerah, dana perimbangan, masih memegang peranan penting sebagai sumber utama keuangan bagi pemerintah daerah. Dominasi ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kontribusi sumber pendapatan lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi yang tinggi dari dana perimbangan dibandingkan dengan PAD menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi daerah pada dukungan keuangan (transfer) dari pemerintah pusat. Namun, diharapkan bahwa ketergantungan ini dapat berkurang secara bertahap dalam jangka panjang. Jika diterapkan secara efektif, otonomi daerah seharusnya memungkinkan daerah untuk mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. Hal ini dapat diukur dengan meningkatkan PAD sebagai persentase dari total pendanaan daerah.

Secara umum pendapatan pemerintah yang berupa PAD, DAU, DAK dan DBH mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sendiri cenderung mengalami penurunan mulai tahun 2018. Seharusnya dengan jumlah pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya mampu membawa pertumbuhan ekonomi untuk ikut naik, tapi nyatanya pertumbuhan perekonomian di provinsi Sumatera Barat malah cenderung mengalami penurunan.

Perbedaan dalam potensi dan situasi di berbagai daerah dapat menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ini dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama dalam manajemen sumber daya daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi Indonesia dan seluruh dunia, termasuk Sumatera Barat, semakin memperburuk situasi ini. Kebijakan pembatasan sosial, seperti lockdown, memiliki signifikan dampak terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi daerah lain.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara sistematis hubungan kompleks antara sumber keuangan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, serta dampak lanjutannya terhadap PDRB di Sumatera Barat. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengurai keterkaitan instrumen keuangan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2 Rumusan masalah.**

Dilihat dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh PAD Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh DAU Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh DAK Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat?
4. Seberapa besar pengaruh DBH Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka tujuan dilaksanakannya riset ini adalah:

1. Melihat besarnya pengaruh PAD Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melihat besarnya pengaruh DAU Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat.
3. Melihat besarnya pengaruh DAK Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat.
4. Melihat besarnya pengaruh DBH Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2022 di Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Berikut manfaat penelitian yang diharapkan peneliti:

a. Manfaat untuk Peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan serta menambah pemahaman pengetahuan tentang ilmu ekonomi serta mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari semasa kuliah.

b. Manfaat kepada Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian di Provinsi Sumatera Barat serta mengharap kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji masalah serupa.

